



LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016

**MONITORING DAN
EVALUASI ATAS
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA
DI WILAYAH NUSA
TENGGARA BARAT**

- BIRO KEUANGAN MA RI
 - BIRO PERLENGKAPAN MA RI
-



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 23/KU.01/9/2016
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan
di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Yth. Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram
Selaku Pembina Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 46, Mataram

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Semester II Tahun 2016 dan mendukung Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2016 pada Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP) yang sudah 4 (empat) kali diraih oleh Mahkamah Agung RI.

Hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan di Wilayah Nusa Tenggara Barat selama 4 hari, mulai tanggal 08 - 11 November 2016, kami laporkan sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara, bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Barang serta mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Tujuan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja di Wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan adalah untuk:

- a. Monitoring kesamaan data Saldo Awal Tahun 2016 terhadap Saldo Akhir Tahun 2015 (*Audited*) pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca (kesamaan Saldo Awal dengan e-Rekon-LK)
- b. Monitoring LRA, LO, LPE dan Neraca tahun Berjalan (Januari s.d. Oktober Tahun 2016) untuk menghindari kesalahan pembebanan akun yang tidak sesuai dengan semestinya, pagu minus, kesalahan penjurnalan pada aplikasi SAIBA dan kesamaan saldo berjalan dengan e-Rekon-LK
- c. Monitoring mutasi data BMN (Barang Milik Negara) antara SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan SIMAKBMN Akrual (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) tahun berjalan (Januari s.d. Oktober Tahun 2016)
- d. Monitoring mutasi Persediaan antara SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan SIMAKBMN Akrual (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) tahun berjalan (Januari s.d. Oktober Tahun 2016)
- e. Mengevaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I dan Triwulan III Tahun 2016 di Wilayah Nusa Tenggara Barat
- f. Mengevaluasi Kertas Kerja Telaah bulan Juni, September dan Oktober guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester II Tahun 2016 pada 17 Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

B. Ruang Lingkup

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan yang bertujuan sebagaimana tersebut di atas pada 17 Satuan Kerja di Wilayah Nusa Tenggara Barat hanya dilaksanakan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 005.01.

C. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Hari : Selasa s.d Jumat
Tanggal : 08 s.d. 12 November 2016
Tempat pelaksanaan : Kantor Pengadilan Tinggi Mataram

2) Pelaksana kegiatan

- a. 1 Koordinator dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Kepala Bagian Akuntansi
- b. 1 Sekretaris dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Akuntansi
- c. 1 Staf Pelaksana dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Akuntansi
- d. 1 Staf Pelaksana dari Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara

3) Peserta kegiatan

Peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi berasal dari 17 Satuan Kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat, berjumlah 34 orang yang merupakan Operator SIMAKBMN dan Operator SAIBA.

4) Pembiayaan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tinggi Mataram, dibebankan pada:

- a. DIPA Pengadilan Tinggi Mataram TA (Tahun Anggaran) 2016 untuk konsumsi selama kegiatan
- b. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung TA 2016 pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan untuk Tim dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan
- c. DIPA masing-masing Satuan Kerja TA 2016 untuk Operator SIMAKBMN dan Operator SAIBA masing-masing Satuan Kerja.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah memperbaiki selisih atau kesalahan pencatatan dan penyajian data keuangan maupun data BMN sampai dengan bulan Oktober Tahun 2016, serta menciptakan keseragaman dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan mulai tingkat Satuan Kerja, Tingkat Wilayah. Tingkat Eselon I dan Tingkat Mahkamah Agung pada Semester II Tahun 2016 dengan berhadapan langsung dengan para Operator SIMAKBMN dan Operator SAIBA.

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Aplikasi SAIBA, SIMAKBMN, Persediaan dan Laporan Keuangan

1. Analisa terhadap data SAIBA

- a. LRA Pendapatan
 - 1) Tidak Terdapat selisih LRA Pendapatan saldo Audited 2015 dengan Saldo Awal 2016
 - 2) Pada Pengadilan Agama Taliwang terdapat kesalahan penggunaan akun Pendapatan Anggaran Lain-Lain (423999) yang merupakan Penerimaan Kembali Persekot Gaji, atas kesalahan ini satuan kerja akan mengajukan Ralat SSBP menjadi 423991.
- b. LRA Belanja
 1. Tidak Terdapat selisih LRA Belanja saldo Audited 2015 dengan Saldo Awal 2016
 2. Terdapat sisa anggaran minus pada akun Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52), pada bulan Oktober 2016 sebagaimana tertera pada daftar lampiran LRA laporan ini. Dimohon satuan kerja melakukan revisi untuk menambah sisa anggaran minus tersebut atau berkoordinasi secara jenjang ke tingkat lebih tinggi yaitu Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Laporan Operasional (LO)
 - 1) Tidak Terdapat selisih antara saldo akhir LO Audited 2015 dengan Saldo Awal LO 2016 pada satuan kerja.
 - 2) Sudah tidak terdapat uraian NULL pada LO pada seluruh satuan kerja. Hal ini merupakan indikator bahwa seluruh satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat telah mengimplementasikan pemutakhiran kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 1) Tidak terdapat selisih saldo akhir LPE Audited 2015 dengan Saldo Awal LPE 2016
 - 2) Terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp262.870.000 pada PN Mataram yang merupakan koreksi kelebihan catat atas Pagar Permanen Nup.2 di Tahun 2014, satuan kerja melakukan koreksi nilai sehingga timbul Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi di LPE, satuan kerja diminta memberikan penjelasan dalam CaLK.
- e. Neraca
 - 1) Tidak Terdapat selisih saldo akhir Neraca Audited 2015 dengan Saldo Awal Neraca 2016
 - 2) Sebagian besar satuan kerja terdapat salah pengimputan kode barang persediaan akun Bahan Baku (117311) seharusnya ke akun Barang Komsumsi (117111) sehingga menimbulkan beban bahan baku pada neraca percobaan, seluruh satuan kerja telah melakukan perbaikan kesalahan kode barang sehingga tidak lagi terdapat akun Bahan Baku.

Seluruh penyebab selisih/kesalahan saldo Neraca tersebut telah dikoreksi dan selesai. Namun bagi yang belum diselesaikan saat kegiatan, Koordinator Wilayah diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke satuan kerja yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan Unit Akuntansi yang berada di atasnya yaitu Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi. Uraian secara detail dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2. Analisa terhadap data SIMAK-BMN

a. Temuan Sistem Pengendalian Internal

- Pada wilayah Nusa Tenggara Barat terdapat 1 (satu) satuan kerja PN Praya yang masuk dalam daftar temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPK tahun 2015 terkait Penghapusan BMN
- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan SIMAK-BMN pada 1 (satu) satuan kerja tersebut telah melaksanakan penginputan transaksi Penghapusan pada Aplikasi SIMAK-BMN, sehingga sudah sesuai dengan rekomendasi BPK-RI
- Terdapat 1 (satu) satuan kerja PA Mataram yang masuk dalam daftar temuan Sistem Pengendalian Internal atas transfer masuk berupa monografi dari Ditjen Badilag yang belum diinput dalam aplikasi Simak BMN
- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan SIMAK-BMN pada 1 (satu) satuan kerja tersebut telah melaksanakan penginputan transaksi Transfer Masuk Badilag pada Aplikasi SIMAK-BMN, sehingga sudah sesuai dengan rekomendasi BPK-RI
- Sebagai bukti bahwa satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut, maka pada 2 (dua) satuan kerja terkait telah diminta membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan telah melaksanakan tindak lanjut dengan menyertakan Rincian Transaksi Harian (RTH) yang telah dilaksanakan.

b. Tindak lanjut Catatan Evaluasi Laporan BMN

Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah melaksanakan evaluasi laporan BMN pada tahun 2015 dengan mengeluarkan buku Catatan Evaluasi Data Laporan BMN Tahun 2015 yang telah disampaikan kepada setiap Koordinator Wilayah (Korwil) untuk dapat melaksanakan tindak lanjut perbaikan laporan BMN. Selanjutnya diminta kepada satuan kerja untuk dapat berkoordinasi dengan KPKNL, Ditjen Badilag, Badilum, dan Badilmiltun serta meminta rekomedasi penyelesaian permasalahan tersebut:

1) Aset Bernilai Tidak Wajar

- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan BMN terdapat 1 (satu) satuan kerja PN Praya yaitu pada Peralatan dan Mesin, satuan kerja telah melakukan tindak lanjut dan meminta penilaian ulang aset kepada KPKNL

2) Perbedaan Luas Tanah dalam laporan dengan KIB

- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan BMN terdapat 2 (dua) satuan kerja PN Sumbawa Besar dan PN Dompus, satuan kerja telah melakukan perbaikan pada SIMAK BMN

3) Kodefikasi Barang Tidak Sesuai

- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan BMN terdapat 7 (tujuh) satuan kerja yaitu : PN Selong, PN Praya, PN Mataram, PA Matarm, PA Praya, PA Selong, dan PT Mataram, satuan kerja telah melakukan perbaikan pada SIMAK BMN

4) Daftar Barang Belum Terdistribusi

- Dari hasil monitoring dan evaluasi data laporan BMN terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja yaitu : PN Bima, PN Sumbawa Besar, PN Selong, PN Dompus, PN Praya, PA Matarm, PA Sumbawa, PA Praya, PA Selong, PT Mataram, PTA Mataram, PA Giri Menang, dan PA Taliwang, satuan kerja telah melakukan perbaikan pada SIMAK BMN.

3. Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja

Hasil monitoring dan evaluasi atas penyusunan laporan keuangan satuan kerja periode Semester I dan Triwulan III Tahun 2016 di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Belum seluruh satuan kerja menyusun laporan keuangan periode Semester I dan Triwulan III Tahun 2016
- b. Beberapa satuan kerja tidak menjelaskan secara menyeluruh pada penjelasan pos-pos realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas
- c. Beberapa satuan kerja tidak menyusun dan melampirkan lampiran A1 (Rincian nilai perolehan, beban penyusutan/amortisasi, akumulasi penyusutan/amortisasi, dan nilai buku aset tetap). Bagi satuan kerja yang telah menyusun dan melampirkan tabel rincian tersebut belum sesuai dengan PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga, serta tidak melampirkan pada Laporan Utama laporan keuangan satuan kerja
- d. Beberapa satuan kerja yang terdapat akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP), pada penjelasan pos-pos neraca belum sesuai dengan PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga, serta tidak menyusun Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang terdiri dari No, KDP, Satker, No. Kontrak, Nilai Kontrak, % penyelesaian, Nilai KDP, dan sumber dana
- e. Beberapa satuan kerja dalam menyusun laporan pendukung dan penempatan tidak disertai dan sesuai daftar isi untuk memudahkan pemeriksaan dan cross check data serta tidak lengkap sesuai hasil cetakan aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN serta data lainnya
- f. Seluruh satuan kerja telah menyusun dan melampirkan kertas kerja telaah laporan keuangan periode Semester I dan Triwulan III Tahun 2016. Dalam pengisian Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan beberapa satuan kerja tidak sesuai dengan kondisi data berkenaan.

F. Kesimpulan

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2016 di wilayah Nusa Tenggara Barat relatif berjalan dengan baik dan lancar sehingga *output* dan *outcome* kegiatan ini dapat tercapai dengan baik
2. Satuan Kerja yang melakukan perbaikan data transaksi saat kegiatan berlangsung, dimohon mengunggah ulang ADK yang telah diperbaiki ke aplikasi e-Rekon-LK pada KPPN. KPPN akan melakukan "*approval*" ulang, menerbitkan BAR ulang dan kedua belah pihak menandatangani BAR ulang secara elektronik.

G. Saran

1. Satuan kerja sejak awal penyusunan anggaran diminta lebih cermat dalam menentukan akun untuk barang yang habis pakai dengan barang yang membentuk persediaan yaitu akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges (521813), Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) dan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123). Total Belanja Barang Persediaan WAJIB SAMA dengan jumlah item barang yang diinput dalam Aplikasi Persediaan pada menu Persediaan Masuk – Pembelian
2. Satuan kerja diminta untuk lebih cermat dan teliti dalam menetapkan kode referensi barang pada Aplikasi Persediaan

3. Meningkatkan pengelolaan penyajian persediaan dan aset dengan melakukan inventarisasi, penilaian, pemanfaatan dan legalitas aset tetap secara rutin
4. Meningkatkan kerja sama dengan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator SAIBA, Operator Persediaan dalam penyusunan pelaporan keuangan
5. Melakukan rekonsiliasi internal bulanan secara rutin antara Operator Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal guna mempertahankan validitas pencatatan aset baik pada aplikasi Persediaan, SIMAKBMN maupun SAIBA
6. Melakukan opname fisik barang persediaan dan menuangkannya dalam Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan serta menginputnya dalam aplikasi Persediaan
7. Satuan Kerja yang memiliki transaksi Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)/Persekot Gaji agar melakukan edit dan meng-*upload* dokumen sumber pada aplikasi Komdanas pada menu Keuangan → LK Semester → *Prepaid*-Persekot Gaji. Petunjuk penggunaan menu Persekot Gaji terdapat dalam aplikasi Komdanas
8. Tidak diperkenankan melakukan Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum dengan tidak sesuai aturan pada data transaksi keuangan dalam rangka menyesuaikan angka maupun menghilangkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya yang belum diregister
9. Menjaga saldo awal Neraca (*audited*), mengingat hal ini adalah syarat pertama tersusunnya kualitas Laporan Keuangan serta menjaga saldo berjalan agar sesuai dengan data pada e-Rekon-LK
10. Para Operator dalam menjalankan tugas dan fungsi terutama pada saat pelaporan diminta untuk tidak dibebankan dengan pekerjaan lain diluar tugas dan fungsinya sebagai Operator mengingat kompleksnya perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual yang memerlukan penanganan terus menerus agar diperoleh data barang dan keuangan yang valid dan akuntabel, untuk terus menjaga kualitas pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan BMN maupun penyusunan Laporan Keuangan untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11. Rekomendasi yang diberikan selama kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan, untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja serta dilakukan monitoring oleh Koordinator Wilayah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan yang sudah berjalan, Koordinator Wilayah diminta untuk menindaklanjutinya langsung ke Satuan Kerja guna pembinaan dan pengarahannya lebih intensif serta mengevaluasi maupun mengoreksi hasil kegiatan yang belum tuntas saat kegiatan. Kuasa Pengguna Anggaran dimohon dapat mendukung program Koordinator Wilayah dalam bentuk anggaran guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang valid, akuntabel, dan tepat waktu di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mendukung program pimpinan Mahkamah Agung dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Demikian laporan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Usaha maksimal telah dilakukan dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan di seluruh satuan kerja di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan pasti terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu koreksi dan dukungan konstruktif kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan kegiatan ini dimasa mendatang.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Staf Bagian Akuntansi,



HAMSARIP ONGSO, S.HI.
NIP 19750706 200312 1 002

Staf Pelaksana Keuangan
Staf Bagian Akuntansi,



IGNASIA SEKAR A. P., SE.
NIP 19870119 201101 2 019

Mataram, 11 November 2016
Koordinator
Kepala Bagian Akuntansi



AZKIA KUSUMASTUTI, SE., MM.
NIP 19770923 200212 2 003

Staf Pelaksana BMN
Staf Bagian Inventarisasi Kekayaan
Negara,



REDI MELFISKO

Tembusan:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
6. Arsip.

HASIL EVALUASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN KEUANGAN KOORDINATOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
SALDO AWAL DAN TAHUN BERJALAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode BAE51	Kode Sarker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)		Saldo Awal 2016		Selisih Pendapatan	Selisih Belanja	Keterangan	Status
				Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja				
1	01	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	20.190.524	10.655.039.991	20.190.524	10.655.039.991	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran akun 511111, 511119, 511121, dan 511124 minus, sarker telah mengajukan penambahan pagu ke Pengadilan Tingkat Banding	OK
2	01	099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	13.739.425	7.583.196.696	13.739.425	7.583.196.696	-	-		OK
3	01	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	70.316.007	4.950.574.297	70.316.007	4.950.574.297	-	-		OK
4	01	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	8.792.657	5.922.785.756	8.792.657	5.922.785.756	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran minus AKUN 51 (Belanja Pegawai) sedang di usulkan Revisi	OK
5	01	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	4.237.044	6.462.079.242	4.237.044	6.462.079.242	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran minus AKUN 51 (Belanja Pegawai) sedang di usulkan Revisi	OK
6	01	099912	PENGADILAN NEGERI PRAVA	92.256.056	6.280.822.916	92.256.056	6.280.822.916	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran minus AKUN 51 (Belanja Pegawai) sedang di usulkan Revisi	OK
7	01	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	28.626.020	8.757.483.860	28.626.020	8.757.483.860	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran akun 511111, 511121, dan 511157 minus, sarker telah mengajukan penambahan pagu melalui Tingkat Banding	OK
8	01	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	340.464.705	4.310.417.969	340.464.705	4.310.417.969	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran minus AKUN 51 (Belanja Pegawai) sedang di usulkan Revisi	OK
9	01	307907	PENGADILAN AGAMA PRAVA	5.692.862	6.968.452.738	5.692.862	6.968.452.738	-	-	1) Terdapat sisa anggaran minus pada akun belanja gaji pokok pns (511111) dan belanja tunj. Struktural pns (511123) pada lra bulan oktober 2016. sudah mengajukan ke pta tetapi blm ada tindak lanjut.	OK

No.	Kode BAKES1	Kode Satker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)		Saldo Awal 2016		Selisih Pendapatan	Selisih Belanja	Keterangan	Status
				Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja				
10	01	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	20.910.437	6.234.866.545	20.910.437	6.234.866.545	-	-	1) Terdapat sisa anggaran minus pada akun belanja tunj. Struktural pns (S11123) pada Itra bulan oktober 2016. sudah mengajukan ke pta tetapi blm ada tindak lanjut.	OK
11	01	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	8.635.233	6.252.246.544	8.635.233	6.252.246.544	-	-	1) Terdapat estimasi pendapatan akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (423122). Sudah dilakukan revisi dipa, sedang menunggu proses revisi. 2) Terdapat sisa anggaran minus pada akun belanja gaji pokok pns (S11111), belanja tunj. Suami/istri PNS (S11121) dan belanja tunj. struktural pns (S11123). sudah melakukan pengajuan revisi dipa kepada pta, sedang menunggu proses revisi.	OK
12	01	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	6.202.533	4.448.902.543	6.202.533	4.448.902.543	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran akun S11123 minus, satker telah melakukan revisi POK pada bulan Nopember 2016	OK
13	01	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	33.185.205	19.532.118.219	33.185.205	19.532.118.219	-	-	Terdapat sisa pagu anggaran akun S11111, S11119, S11121, S11122 dan S11123 minus, satker telah mengajukan penambahan pagu ke Biro Perencanaan dan Organisasi tetapi belum mendapat tambahan pagu	OK

No.	Kode BAEs1	Kode Satker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Auditrnd)		Saldo Awal 2016		Selisih Pendapatan	Selisih Belanja	Keterangan	Status
				Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja				
14	01	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	25.115.198	18.302.888.569	25.115.198	18.302.888.569	-	-	2) Terdapat sisa anggaran minus pada akun belanja gaji pokok pns (511111),belanja tunj. Suami/istri PNS (511121), belanja tunj. anak pns (511122) dan belanja tunj. struktural pns (511123). sudah melakukan pengajuan revisi dipa kepada pta, sedang menunggu proses revisi.	OK
15	01	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	12.635.857	5.743.036.302	12.635.857	5.743.036.302	-	-		OK
16	01	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	62.756.800	6.597.332.910	62.756.800	6.597.332.910	-	-	1) Terdapat sisa anggaran minus pada akun belanja gaji pokok pns (511111), belanja tunj. struktural pns (511123), belanja tunjangan kemahalan hakim (511157). sudah melakukan pengajuan revisi dipa kepada pta, sedang menunggu proses revisi.	OK
17	01	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	32.108.945	6.886.268.703	32.108.945	6.886.268.703	-	-	1)Terdapat sisa pagu anggaran 522112 minus, akibat data Revisi SAS tidak dapat ditarik, telah dilakukan Input Revisi POK secara manual sehingga tidak lagi terdapat sisa pagu anggaran minus, 2)Terdapat kesalahan penggunaan akun Pendapatan Anggaran Lain-Lain (423999) yang merupakan Penerimaan Kembali Persekot Gaji, atas kesalahan ini Satker akan mengajukan Ralat SSBBP menjadi 423991	OK
JUMLAH				785.865.508	135.888.513.800	785.865.508	135.888.513.800	-	-		OK

HASIL EVALUASI NERACA LAPORAN KEUANGAN KOORDINATOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
 SALDO AWAL DAN TAHUN BERJALAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode BAEs1	Kode Saktet	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)	Saldo Awal 2016	Selisih	Keterangan	Status	Rekonsiliasi BMN Periode Berjalan		Periode Rekonsiliasi	Selisih	Status	Keterangan
									SAIBA	SIMAKBMN				
1	01	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	28.611.292.774	28.611.292.774	-		OK	28.060.575.219	28.060.575.219	Oktober	-	OK	
2	01	099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	10.321.898.945	10.321.898.945	-		OK	10.208.109.717	10.208.109.717	Oktober	-	OK	
3	01	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	15.495.310.670	15.495.310.670	-		OK	15.976.304.549	15.976.304.549	Oktober	-	OK	
4	01	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	8.621.312.834	8.621.312.834	-		OK	10.177.123.141	10.177.123.141	Oktober	-	OK	
5	01	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	9.545.428.006	9.545.428.006	-		OK	10.938.329.729	10.938.329.729	Oktober	-	OK	
6	01	099912	PENGADILAN NEGERI PRAVA	16.745.004.807	16.745.004.807	-		OK	16.563.584.254	16.563.584.254	Oktober	-	OK	
7	01	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	7.589.451.410	7.589.451.410	-		OK	7.829.513.316	7.829.513.316	Oktober	-	OK	
8	01	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	8.468.846.740	8.468.846.740	-		OK	10.006.691.372	10.006.691.372	Oktober	-	OK	
9	01	307907	PENGADILAN AGAMA PRAVA	4.387.887.544	4.387.887.544	-	1) Terdapat selisih rincian aset antara simak dengan saiba audited 2015 dimana saiba mencatat akun aset tak berwujud lainnya, sedangkan pada aplikasi simak dicatat sebagai software. Saat kegiatan berlangsung sudah dilakukan jurnal koreksi antar akun pada jurnal umum.	OK	5.170.554.381	5.170.554.381	Oktober	-	OK	1) Terdapat selisih antara simak dengan saiba pada menu rekon spm bmn bulan februari dan juni dikarenakan simak salah dalam catat nomor sp2d

No.	Kode BAE1	Kode Satker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)	Saldo Awal 2016	Selisih	Keterangan	Status	Rekonsiliasi BMN Periode Berjalan		Periode Rekonsiliasi	Selisih	Status	Keterangan
									SAIBA	SIMAKBMN				
10	01	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	9.566.686.285	9.566.686.285	-	1) Terdapat selisih rincian aset antara simak dengan saiba audited 2015 dimana saiba mencatat akun aset tak berwujud lainnya, sedangkan pada aplikasi simak dicatat sebagai software. Saat kegiatan berlangsung sudah dilakukan jurnal koreksi antar akun pada jurnal umum.	OK	9.430.369.409	9.430.369.409	Oktober	-	OK	
11	01	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	4.922.812.455	4.922.812.455	-		OK	4.947.017.889	4.947.017.889	Oktober	-	OK	
12	01		PENGADILAN AGAMA DOMPU	2.984.428.914	2.984.428.914	-		OK	3.024.509.377	3.024.509.377	Oktober	-	OK	
		307932												
13	01	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	19.541.545.238	19.541.545.238	-		OK	19.553.929.680	19.553.929.680	Oktober	-	OK	
14	01	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	13.144.283.426	13.144.283.426	-		OK	13.398.689.937	13.398.689.937	Oktober	-	OK	
15	01	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	7.163.416.512	7.163.416.512	-		OK	7.314.707.019	7.314.707.019	Oktober	-	OK	

No.	Kode BAEs1	Kode Satker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)	Saldo Awal 2016	Selisih	Keterangan	Status	Rekonsiliasi BMN Periode Berjalan		Periode Rekonsiliasi	Selisih	Status	Keterangan
									SAIBA	SIMAKBMN				
16	01	61.4727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	6.155.541.004	6.155.541.004	-		OK	6.253.146.655	6.253.146.655	Oktober	-	OK	1) Terdapat selisih antara simak dengan saiba pada menu rekon spm bmn dikarenakan simak salah dalam catat nomor spzd dan salah dalam mencatat tanggal buku yang seharusnya disamakan dengan tanggal spzd. Saat kegiatan berlangsung sudah diperbaiki.
17	01	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	10.346.887.687	10.346.887.687	-		OK	10.999.539.211	10.999.539.211	Oktober	-	OK	1) Terdapat kelebihan pencatatan pembelian CCTV Rp8.-, satker telah melakukan perbaikan ADK, 2) Terdapat kesalahan pencatatan BM Gedung dan Bangunan (533111) dicatat BM Tanah (531111) pada SIMAKBMN, Satker telah melakukan perbaikan ADK, 3) Terdapat kekurangan input perjalanan dinas pembangunan (533111), satker telah melakukan perbaikan ADK.
JUMLAH				183.612.035.251	183.612.035.251	-		OK	189.852.694.855	189.852.694.855		-	OK	

HASIL EVALUASI LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN KEUANGAN KOORDINATOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
SALDO AWAL DAN TAHUN BERJALAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode BACS1	Kode Saker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)	Saldo Awal 2016	Saldo Berjalan Oktober	Selisih	Keterangan	Status
1	01	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	(10.696.768.163)	(10.696.768.163)	(8.782.370.236)	-		OK
2	01	099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	(5.956.339.057)	(5.956.339.057)	(5.515.112.899)	-		OK
3	01	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	(4.872.010.440)	(4.872.010.440)	(3.912.522.079)	-		OK
4	01	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	(6.107.994.900)	(6.107.994.900)	(5.064.633.346)	-		OK
5	01	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	(4.493.895.651)	(4.493.895.651)	(3.798.897.715)	-		OK
6	01	099912	PENGADILAN NEGERI PRAVA	(6.216.038.960)	(6.216.038.960)	(4.479.885.891)	-		OK
7	01	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	(8.883.690.885)	(8.883.690.885)	(7.532.929.013)	-		OK
8	01	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	(3.917.678.907)	(3.917.678.907)	(3.760.895.956)	-		OK
9	01	307907	PENGADILAN AGAMA PRAVA	(6.904.789.515)	(6.904.789.515)	(5.373.710.160)	-		OK
10	01	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	(6.455.207.541)	(6.455.207.541)	(5.525.731.197)	-		OK
11	01	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	(6.319.920.528)	(6.319.920.528)	(5.483.292.209)	-		OK
12	01	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	(4.442.964.229)	(4.442.964.229)	(3.468.447.485)	-		OK
13	01	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	(19.997.056.254)	(19.997.056.254)	(17.131.711.224)	-		OK
14	01	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	(18.473.175.924)	(18.473.175.924)	(16.652.213.620)	-		OK
15	01	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	(5.958.861.017)	(5.958.861.017)	(5.078.584.749)	-		OK
16	01	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	(6.247.092.061)	(6.247.092.061)	(5.957.854.124)	-		OK
17	01	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	(3.730.727.953)	(3.730.727.953)	(1.321.429.947)	-		OK
JUMLAH				(129.674.211.985)	(129.674.211.985)	(2.603.593.224)	-		OK

HASIL EVALUASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LAPORAN KEUANGAN KOORDINATOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
SALDO AWAL DAN TAHUN BERJALAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode BAEs1	Kode Satker	Satuan Kerja	Saldo Akhir 2015 (Audited)	Saldo Awal 2016	Saldo Berjalan Oktober	Selisih	Keterangan	Status
1	01	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	28.611.292.774	28.611.292.774	28.060.575.219	-	Timbul Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp262.870.000 yang merupakan Koreksi Kelebihan Catat atas Pagar Permanaen Nup 2 di Tahun 2014, sehingga satker melakukan koreksi nilai dan timbul Koreksi tersebut di LPE satuan kerja diminta memberi penjelasan pada Laporan Keuangan	OK
2	01	099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	10.321.898.945	10.321.898.945	10.215.021.384	-		OK
3	01	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	15.495.310.670	15.495.310.670	15.971.393.049	-		OK
4	01	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	8.618.370.036	8.618.370.036	10.177.123.141	-		OK
5	01	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	9.542.620.899	9.542.620.899	10.938.329.729	-		OK
6	01	099912	PENGADILAN NEGERI PRAVA	16.738.496.525	16.738.496.525	16.563.584.254	-		OK
7	01	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	7.589.451.410	7.589.451.410	7.829.513.316	-		OK
8	01	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	8.468.846.740	8.468.846.740	10.006.691.372	-		OK
9	01	307907	PENGADILAN AGAMA PRAVA	4.387.101.144	4.387.101.144	5.170.554.381	-		OK
10	01	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	9.562.433.405	9.562.433.405	9.430.369.409	-		OK
11	01	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	4.808.332.605	4.808.332.605	4.947.017.889	-		OK
12	01	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	2.984.428.914	2.984.428.914	3.024.509.377	-	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp46.666 berasal dari perubahan kode barang menyebabkan selisih masa manfaat satuan kerja diminta memberi penjelasan pada Laporan Keuangan	OK
13	01	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	19.509.819.571	19.509.819.571	19.560.841.347	-		OK
14	01	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	13.147.894.977	13.147.894.977	13.398.689.937	-		OK
15	01	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	7.157.748.128	7.157.748.128	7.314.707.019	-		OK
16	01	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	6.155.541.004	6.155.541.004	6.253.146.655	-		OK
17	01	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	10.346.887.687	10.346.887.687	10.999.539.211	-		OK
JUMLAH							-		OK

REKAPITULASI MONITORING DAN EVALUASI DATA LAPORAN BMN
PADA SATUAN KERJA WILAYAH KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) NTB (005.01.2300)
TAHUN ANGGARAN 2016

NOL	KODE SATKER	SATUAN KERJA	CAT.1		CEK TINDAK LANJUT	CAT.3		CEK TINDAK LANJUT	CAT.6		CEK TINDAK LANJUT	CAT.8		CEK TINDAK LANJUT	Jumlah Temuan Internal	KETERANGAN
			Aset Berwujud Tidak Wajar (Rp. 1,2)	Nilai		Perbedaan Luas Tanah Dalam Laporan BMN dan KIB	Nilai		Kode/Status Barang Tidak Sesuai	Nilai		Temuan SP BPK				
1	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	-	-	-	-	-	-	1	1.800.000	disarankan setelah melakukan tindak lanjut pada aplikasi smak dengan melakukan rekonsiliasi dan menyesuaikan dengan kode barang yg tepat dan dibuktikan surat keterangan dan stempel pada setiap berkas.	-	-	2 Catatan	-	
2	099879	PENGADILAN NEGERI RABAH/BINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Catatan	terdapat barang yg belum terdistribusi di DBR, DBR, KIB	
3	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	-	-	-	1	luas tanah tercatat pada KIB 780, sementara pada laporan tercatat 950.	dibuktikan koneksi nilai buktikan pada aplikasi smak sesuai dengan nilai pada sertifikat.	-	-	-	-	-	1 Catatan	terdapat barang yg belum terdistribusi di DBR.	
4	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	-	-	-	-	-	-	1	6.500.000	disarankan setelah melakukan tindak lanjut pada aplikasi smak dengan melakukan rekonsiliasi dan menyesuaikan dengan kode barang yg tepat dan dibuktikan surat keterangan dan stempel pada setiap berkas.	-	-	2 Catatan	terdapat barang yg belum terdistribusi di DBR.	
5	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	-	-	-	9	1.749.407.000	Selanjutnya menilai 4 tanah tempo tercatat 9 tanah dan di serahkan setelah melakukan rekonsiliasi keluar dan koneksi pencatatan untuk melakukan penggabungan nilai terhadap tanah sesuai dengan sertifikat yg ada.	-	-	-	-	-	1 Catatan	terdapat barang yg belum terdistribusi di DBR.	
6	099912	PENGADILAN NEGERI PRAYU	1	1	1	-	-	-	15	30.970.000	disarankan setelah melakukan tindak lanjut pada aplikasi smak dengan melakukan rekonsiliasi dan menyesuaikan dengan kode barang yg tepat dan dibuktikan surat keterangan dan stempel pada setiap berkas.	terdapat penghapusan tahun 2015	3 Catatan	terdapat barang yg belum terdistribusi di DBR, DBR, KIB, Terdapat salah kode barang pada 3.07.xxx, 3.08.xxx/3.09.xxx		

